
Simbol dalam Tata Ruang: Kota sebagai Representasi Kekuasaan

Djufri

Universitas Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur

*Corresponding author: djufri@umberau.ac.id

Abstrak

Kota bukan hanya ruang fisik, melainkan medan simbolik tempat kekuasaan dipertontonkan dan dinegosiasikan. Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana simbol dalam tata ruang kota digunakan sebagai sarana representasi kekuasaan sekaligus ruang resistensi masyarakat. Studi ini mengambil kasus Kota Makassar, yang mengalami transformasi urban signifikan dalam dua dekade terakhir. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis antropologi kritis, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta analisis dokumentasi simbol-simbol kota. Temuan menunjukkan bahwa tata ruang Makassar melalui gedung monumental, tugu pahlawan, penataan kawasan elit, dan eksklusi terhadap warga marjinal-memuat narasi dominasi negara dan kapital. Namun, warga juga memproduksi ruang alternatif melalui mural, komunitas lorong, dan simbol lokal sebagai bentuk perlawanan simbolik. Analisis menggunakan teori Stuart Hall, Henri Lefebvre, dan Antonio Gramsci memperlihatkan bahwa kota merupakan teks budaya yang sarat kuasa dan makna. Penelitian ini menegaskan pentingnya membaca ruang kota secara kritis agar pembangunan tidak hanya estetis, tetapi juga adil dan inklusif secara simbolik.

Kata Kunci: Ruang kota, Simbol, Representasi Kekuasaan, Resistensi, Makassar

Pendahuluan

Kota tidak hanya dibentuk oleh beton, jalan, dan bangunan tinggi; ia juga disusun oleh narasi, simbol, dan kuasa yang menyusup ke dalam setiap jengkal ruangnya (Kim & Min, 2019; Patel & Manvi, 2023). Dalam kehidupan urban, tata ruang bukan sekadar penataan fisik, melainkan arena pertarungan makna yang merefleksikan siapa yang memiliki kekuasaan, siapa yang diberi ruang, dan siapa yang perlahan-lahan disingkirkan dari peta simbolik kota (Colombijn, 2006; Uddin & Piracha, 2023). Makassar, sebagai kota pesisir yang sedang mengalami transformasi besar-besaran dalam dua dekade terakhir, menjadi contoh menarik untuk memahami bagaimana simbol dan representasi bekerja dalam arsitektur dan tata ruang kota (Akil et al., 2014; Rahim & Abbas, 2024).

Ketika sebuah taman publik ditata ulang dengan estetika modern namun mengusir pedagang kecil, atau ketika nama jalan diubah demi menyesuaikan narasi nasional yang dominan, kita sedang menyaksikan proses representasi simbolik yang tidak pernah netral (Matamanda et al., 2021; Monnet, 2011). Dalam konteks inilah kota dipahami bukan hanya sebagai entitas fisik, tetapi sebagai konstruksi sosial dan ideologis yang sarat dengan kuasa (Allen, 2010; Colombijn, 2006). Representasi simbolik dalam tata ruang kota, sebagaimana dijelaskan oleh Stuart Hall, adalah proses produksi makna melalui bahasa visual, tanda, dan bentuk yang digunakan untuk menggambarkan realitas sosial dan politik (Colombijn, 2006; Mourtada, 2019). Dalam kerangka ini, kota menjadi

teks budaya yang dapat dibaca, ditafsirkan, dan dikritisi (Kozlova, 2021; Šakaja & Crljenko, 2017).

Makassar, sebagai salah satu kota besar di Indonesia Timur, mengalami proses urbanisasi yang cepat dan penuh dinamika (Knox & McCarthy, 2012; Surya et al., 2021). Kawasan seperti Center Point of Indonesia (CPI), Jalan Jenderal Sudirman, dan aneka tugu atau landmark di sepanjang Pantai Losari, menunjukkan bagaimana kekuasaan-baik negara maupun kapital mengukuhkan dirinya melalui simbol ruang (Kozlova, 2021; Surya et al., 2021). Jalan yang lebar dan lurus menuju kantor pemerintahan, monumen pahlawan nasional, serta desain arsitektur monumental menjadi penanda visual dominasi negara dan elite (Arifin et al., 2023).

Secara teoritis, Henri Lefebvre menegaskan bahwa ruang adalah hasil konstruksi sosial, diciptakan melalui relasi kuasa, praktik ekonomi, dan ideologi dominan (Uddin & Piracha, 2023). Dalam *The Production of Space* (1991), Lefebvre menunjukkan bahwa ruang tidak pernah hadir begitu saja, tetapi selalu diproduksi melalui tiga dimensi: praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasional (Rutanen, 2017). Ketika pusat kekuasaan negara dibangun megah di tengah kota, sementara pinggiran kota dibiarkan dengan infrastruktur yang minim, yang terjadi bukan hanya ketimpangan spasial, tetapi juga eksklusi simbolik (Filion & Keil, 2017; Kebir & Zeghiche, 2022). Demikian pula, Antonio Gramsci dalam konsep hegemoninya menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja bukan hanya melalui paksaan, tetapi melalui dominasi simbolik yang membuat masyarakat menerima ketimpangan sebagai sesuatu yang wajar (Fansuri, 2017).

Dalam konteks literatur akademik, banyak penelitian yang menyoroti aspek fisik dan fungsional tata ruang kota, terutama terkait dengan kebijakan tata guna lahan, mobilitas, dan pembangunan berkelanjutan (Levin-Keitel & Reeker, 2021). Namun, studi yang secara mendalam menelaah simbolisme dalam ruang kota sebagai arena representasi kekuasaan masih relatif terbatas, terutama dalam konteks kota-kota di luar Jawa (Firzal, 2020; Mourtada, 2019). Di Indonesia, sebagian besar kajian kritis tentang ruang kota berfokus pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya, sementara kota-kota seperti Makassar yang memiliki dinamika politik-kultural yang kompleks cenderung belum banyak disentuh dari perspektif simbolik dan antropologis (Surya et al., 2023).

Kesenjangan penelitian inilah yang ingin dijembatani dalam kajian ini. Kajian ini tidak hanya berupaya memetakan simbol-simbol yang hadir dalam ruang kota Makassar, tetapi juga membongkar bagaimana simbol-simbol tersebut berfungsi sebagai medium reproduksi makna sosial, politik, dan budaya dalam dinamika kehidupan urban. Simbol-simbol yang muncul dalam ruang publik tidak berdiri netral, melainkan menjadi instrumen yang secara halus meneguhkan struktur kekuasaan dan memperkuat hegemoni kelompok tertentu melalui representasi nilai, identitas, dan kepentingan yang terselubung. Dengan menelaah bagaimana simbol-simbol ini diproduksi, disebarluaskan, dan diinterpretasikan oleh masyarakat, kajian ini berupaya mengungkap relasi kuasa yang bekerja di balik narasi pembangunan kota, estetika ruang publik, serta kebijakan tata ruang yang kerap kali mengabaikan dimensi sosial dan kultural masyarakat lokal. Lebih jauh, penelitian ini juga menelusuri bagaimana simbol-simbol tersebut memengaruhi kesadaran kolektif masyarakat urban, membentuk cara pandang terhadap

modernitas dan kemajuan, sekaligus menciptakan segmentasi sosial yang memperlihatkan adanya jarak antara kelompok elit perkotaan dan warga biasa (Alcaraz, 2024; Firzal, 2020). Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kritis tentang peran simbolik ruang kota sebagai arena pertarungan makna dan kekuasaan dalam konteks sosial budaya Makassar yang terus berkembang

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada keberaniannya untuk membaca kota sebagai medan semiotik-di mana simbol, bentuk arsitektur, penamaan jalan, dan penempatan gedung menjadi bagian dari sistem representasi yang membawa pesan ideologis (Fawzy, 2023; Lagopoulos, 2019). Dengan memanfaatkan perspektif Stuart Hall tentang representasi budaya, Lefebvre tentang produksi ruang, dan Gramsci tentang hegemoni, penelitian ini tidak hanya mengungkap struktur, tetapi juga makna yang tersembunyi di balik desain kota (Lee, 2022). Kajian ini juga membawa pendekatan kontekstual yang jarang digunakan dalam kajian urban Indonesia, yaitu dengan fokus pada Makassar sebagai studi kasus yang selama ini berada di pinggiran diskursus akademik arsitektur simbolik (Andersson et al., 2021).

Lebih jauh, studi ini berupaya menunjukkan bahwa simbol dalam ruang kota bukan hanya milik negara atau elite, tetapi juga diproduksi, ditafsirkan, dan dilawan oleh masyarakat (Awad, 2017; Collister & Bowman, 2018). Dalam beberapa kasus, warga Makassar membentuk ruang-ruang kolektif seperti taman komunitas di lorong-lorong sempit, menciptakan mural sebagai simbol perlawanan, atau bahkan menamai ulang ruang-ruang informal dengan istilah lokal yang tidak diakui secara resmi (González, 2023; Palutturi et al., 2021).

Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana tata ruang kota dapat dipahami sebagai representasi kekuasaan, dengan menelaah simbol-simbol yang muncul dalam ruang publik di Kota Makassar. (Jokar et al., 2022). Ketika kota dibangun untuk menarik investasi dan wisatawan, maka simbol-simbol yang ditampilkan sering kali disesuaikan dengan selera kapital, bukan dengan aspirasi warga lokal (Daly et al., 2021; Sheng & Gao, 2018). Akibatnya, kota kehilangan akar budayanya, dan masyarakat merasa terasing di ruang yang seharusnya mereka miliki (Taylor, 2016; Xie et al., 2022). Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana simbol-simbol tersebut mengartikulasikan kekuasaan, serta bagaimana masyarakat menafsirkan dan meresponsnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian sosiologi kota, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang dinamika simbolik antara ruang, kekuasaan, dan identitas dalam konteks perkotaan Indonesia. (Khokholova et al., 2021; Šakaja & Crljenko, 2017).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi antropologi kritis, yang berfokus pada penafsiran makna simbolik dalam tata ruang kota sebagai representasi kekuasaan. Desain ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak bersifat kuantitatif atau dapat diukur secara statistik, melainkan berkaitan dengan persepsi, narasi, dan relasi kuasa yang tersembunyi dalam ruang-ruang kota. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana makna dibentuk, dinegosiasikan, dan dilawan oleh berbagai kelompok sosial dalam konteks perkotaan.

Tahapan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa proses utama: (1) studi pustaka dan pemetaan konseptual terkait teori representasi simbolik, produksi ruang, dan hegemoni; (2) observasi lapangan di beberapa titik strategis di Kota Makassar yang merepresentasikan simbol kekuasaan dan resistensi; (3) wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari warga kota, arsitek, seniman urban, aktivis komunitas, serta pengambil kebijakan; dan (4) analisis data dengan pendekatan tematik yang menghubungkan data lapangan dengan kerangka teori.

Subjek dalam penelitian ini adalah kelompok sosial yang hidup, bekerja, dan beraktivitas dalam ruang-ruang kota Makassar yang dianggap sebagai arena representasi simbolik—baik itu ruang yang mencerminkan kekuasaan (seperti gedung pemerintahan, taman protokol, jalan utama) maupun ruang yang menunjukkan resistensi atau praktik alternatif (seperti lorong-lorong warga, mural komunitas, taman informal). Objek penelitian, dalam hal ini, adalah simbol-simbol yang hadir dalam tata ruang kota—baik yang bersifat visual (patung, tugu, arsitektur gedung), verbal (penamaan jalan, narasi papan informasi), maupun spasial (penataan kawasan, pola pemisahan ruang publik).

Indikator penelitian ini dibangun berdasarkan tiga kerangka konseptual utama yang saling melengkapi. Pertama, representasi simbolik, yang ditandai dengan hadirnya elemen-elemen visual, arsitektural, maupun naratif yang merepresentasikan identitas, nasionalisme, dan kekuasaan. Representasi ini menjadi sarana komunikasi ideologis yang membentuk cara masyarakat memahami ruang dan makna yang terkandung di dalamnya. Kedua, produksi ruang, yang menyoroti bagaimana ruang kota tidak sekadar entitas fisik, melainkan hasil dari proses sosial, politik, dan ekonomi yang menentukan siapa yang memiliki kendali terhadapnya, serta siapa yang terpinggirkan atau mengalami eksklusi. Dengan demikian, tata ruang dan desain kota mencerminkan relasi kekuasaan yang kompleks. Ketiga, hegemoni dan resistensi, yang mengkaji sejauh mana makna-makna dominan dalam ruang kota diterima, dinegosiasikan, atau justru dilawan oleh masyarakat melalui praktik keseharian. Melalui ketiga indikator ini, penelitian berupaya memahami kota sebagai medan makna dan kekuasaan yang terus dinegosiasikan antara struktur dominan dan agen sosial yang beragam.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di ruang-ruang kota seperti Pantai Losari, Jalan Jenderal Sudirman, Center Point of Indonesia (CPI), Karebosi, hingga lorong-lorong komunitas di Tallo dan Ujung Tanah. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan terhadap sekitar 12 informan yang dipilih secara purposif. Informan meliputi warga kota dari berbagai latar belakang sosial, aktivis ruang publik, pengusaha kecil yang terdampak kebijakan tata kota, hingga pejabat lokal bidang penataan ruang.

Untuk data sekunder, peneliti mengakses dokumen perencanaan kota, media lokal, arsip sejarah, serta studi terdahulu yang relevan dengan konteks simbolisme dalam ruang kota. Sumber ini memberikan perspektif struktural dan historis yang memperkaya pemahaman terhadap konteks lokal Makassar.

Teknik penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, yakni memilih individu-individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam ruang-ruang kota yang dikaji. Dalam beberapa kasus, teknik snowball digunakan untuk mendapatkan akses terhadap informan kunci dari kalangan komunitas lokal yang sulit dijangkau secara formal.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik, di mana setiap data lapangan dikodekan dan dikategorisasi berdasarkan tema-tema kunci yang berkaitan dengan simbol, kekuasaan, resistensi, dan pengalaman ruang. Analisis dilakukan secara induktif, dengan membiarkan data "berbicara", namun tetap diarahkan oleh kerangka teori Hall, Lefebvre, dan Gramsci. Proses ini memungkinkan peneliti untuk membangun narasi yang menjelaskan bagaimana simbol-simbol ruang kota bekerja dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Makassar.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, etika penelitian menjadi perhatian utama. Setiap informan diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian, dan persetujuan mereka diperoleh sebelum wawancara dilakukan. Identitas informan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan mereka. Peneliti juga berkomitmen untuk menjaga posisi netral dan tidak mengintervensi narasi atau opini informan, agar data yang diperoleh tetap autentik dan mencerminkan suara masyarakat secara jujur.

Pemilihan metode ini dipertimbangkan dengan matang karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu menggali makna dan praktik simbolik dalam ruang kota yang tidak dapat dijelaskan melalui angka atau statistik. Keandalan data diperkuat dengan triangulasi sumber (data primer dan sekunder), triangulasi metode (observasi dan wawancara), serta validasi naratif melalui konfirmasi silang antar informan. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya valid secara akademik, tetapi juga kontekstual, relevan, dan bermakna dalam praktik pembangunan kota yang adil dan inklusif.

Hasil and Pembahasan

Representasi Kekuasaan dalam Tata Ruang Kota Makassar

Hasil observasi di Kota Makassar menunjukkan bahwa penataan ruang public terutama di kawasan strategis seperti Pantai Losari, Jalan Jenderal Sudirman, dan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) didominasi oleh simbol-simbol yang merepresentasikan kekuasaan negara dan kapital. Gedung-gedung pemerintahan berdiri megah dengan desain arsitektur monumental, menggunakan pilar besar, kaca tinggi, serta dikelilingi ruang terbuka steril tanpa aktivitas informal. Di sepanjang jalan protokol, patung-patung tokoh nasional dan bendera merah putih dikibarkan secara seragam di titik-titik tertentu, menandakan dominasi narasi kebangsaan versi negara.

Seorang informan, petugas kebersihan yang sehari-hari bekerja di kawasan kantor wali kota, menyampaikan, "Setiap kali ada pejabat datang, kawasan ini dibersihkan total. Bahkan penjual asongan disuruh pergi. Katanya biar tampak rapi. Tapi sehari-hari ya sepi, nggak ada kehidupan." Ucapan ini memperlihatkan bagaimana ruang kota dipersiapkan secara visual untuk mempertontonkan kekuasaan, meskipun tak selalu relevan dengan kehidupan warga.

Temuan ini konsisten dengan teori representasi Stuart Hall, yang menyatakan bahwa simbol tidak pernah netral, melainkan bagian dari sistem produksi makna yang dikendalikan oleh kekuasaan. Ketika kota ditata sedemikian rupa untuk menampilkan kekuasaan secara visual baik melalui gedung, monumen, maupun jalan raya yang sedang terjadi adalah proses pembentukan realitas sosial-politik melalui estetika kota.

Eksklusi Sosial dan Peminggiran Makna dalam Ruang Publik

Salah satu temuan menarik adalah bagaimana ruang publik yang dahulu inklusif kini perlahan berubah menjadi eksklusif. Taman kota yang dulu ramai oleh aktivitas warga kini dipagari dan dijaga, dengan akses yang lebih terbuka bagi kelompok tertentu. Di Pantai Losari, misalnya, penataan ulang kawasan dilakukan dengan memasang elemen-elemen artistik, lampu sorot, dan tempat duduk yang tertata. Namun, menurut pedagang kaki lima yang dulunya berjualan di sana, “Dulu kami bisa jualan, anak-anak main bebas. Sekarang kami digusur. Katanya taman buat semua, tapi kok malah seperti buat turis dan orang kaya.”

Pengalaman ini memperlihatkan bagaimana logika kapital dan kekuasaan bekerja dalam mengatur ruang. Dalam istilah Henri Lefebvre, ini merupakan bentuk *representations of space* ruang yang diproduksi oleh elite melalui desain dan peraturan yang sering kali bertolak belakang dengan *representational space*, yaitu ruang sebagaimana dialami secara emosional oleh masyarakat.

Secara visual, kota menunjukkan keteraturan. Tapi secara sosial, kota menjadi alat eksklusi. Di titik ini, teori hegemoni Gramsci relevan digunakan: warga secara perlahan menerima bahwa ruang yang indah adalah ruang tanpa mereka. Ketimpangan menjadi sesuatu yang dianggap “biasa”, bahkan “wajar”, karena dibungkus dalam narasi “penataan kota” atau “kemajuan”.

Ruang Resistensi dan Narasi Alternatif

Meski dominasi kekuasaan tampak kuat, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa warga tidak sepenuhnya tunduk. Di beberapa wilayah seperti lorong-lorong permukiman di Tallo dan Tamalate, warga mulai membentuk ruang tandingan. Mereka membuat mural yang merepresentasikan sejarah lokal, kebudayaan komunitas, dan kritik terhadap pembangunan yang tidak adil.

Seorang seniman mural yang tinggal di kawasan lorong budaya berkata, “Kami tahu tidak akan diundang ke ruang kota versi pemerintah. Maka kami buat ruang kami sendiri. Ini cara kami bicara.” Dalam konteks Stuart Hall, ini adalah *oppositional reading*—penolakan terhadap makna dominan yang disisipkan dalam simbol kota. Di saat negara mengangkat tugu pahlawan sebagai lambang nasionalisme, warga menciptakan mural ibu-ibu pasar sebagai lambang kehidupan nyata.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang kota adalah arena pertarungan makna. Setiap simbol, nama jalan, hingga warna dinding menjadi medan di mana kuasa dan perlawanan saling bertemu. Lefebvre menyebut ini sebagai *dialektika ruang*, di mana ruang yang diproduksi secara *top-down* selalu berhadapan dengan ruang yang tumbuh dari bawah.

Struktur Vertikal dan Penandaan Status Sosial

Temuan lain yang signifikan adalah bagaimana tinggi bangunan, jenis material, dan warna yang digunakan dalam arsitektur menciptakan hierarki sosial yang kasat mata. Di kawasan bisnis seperti Jalan AP Pettarani dan Hertasning, gedung pencakar langit milik perbankan dan pengembang properti mendominasi cakrawala kota. Sebaliknya, di wilayah pinggiran seperti Biringkanaya, warga tinggal di rumah-rumah

sempit yang tumbuh tidak terencana, tanpa ruang terbuka atau simbol kota yang mengafirmasi keberadaan mereka.

Seorang pengemudi ojek daring mengatakan, “Kadang saya bawa penumpang ke lantai 20 gedung mewah. Di luar kaca semua. Habis itu balik ke rumah sempit di gang sempit. Rasanya kayak hidup di dua kota yang beda.” Testimoni ini memperkuat argumentasi Gramsci bahwa hegemoni tidak hanya bekerja secara fisik, tapi juga psikologis—menanamkan perasaan “tidak layak” atau “bukan milik kita” terhadap ruang-ruang tertentu di kota.

Secara teoritis, tinggi bangunan dan penataan ruang dapat dibaca sebagai sistem simbolik yang menunjukkan siapa yang memiliki kuasa atas kota. Semakin menjulang bangunan dan semakin eksklusif tata ruangnya, semakin besar pula simbol dominasi ekonomi dan politik yang ingin ditampilkan oleh aktor-aktor tertentu. Dalam konteks ini, ruang tidak hanya berfungsi sebagai wadah aktivitas sosial, tetapi juga sebagai arena representasi kekuasaan yang mengukuhkan hierarki sosial.

Hal ini sejalan dengan kajian ([Khokholova et al., 2021](#)) tentang *symbolic economy*, yang menekankan bahwa ruang kota dibentuk bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan fungsional, melainkan juga sebagai sarana pencitraan dan pertunjukan kuasa. Menurut Zukin, pembangunan fisik kota—mulai dari gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, hingga ikon arsitektur—berfungsi untuk menampilkan nilai estetika dan prestise yang menegaskan siapa yang berhak “memiliki” wajah kota. Dengan demikian, dimensi vertikal dan estetis dari ruang perkotaan menjadi representasi nyata dari stratifikasi sosial dan politik yang berlangsung di dalamnya.

Perbandingan dengan Studi Sebelumnya dan Arah Masa Depan

Temuan dalam penelitian ini selaras dengan beberapa studi sebelumnya yang menelaah ruang kota sebagai alat dominasi simbolik, seperti yang dilakukan oleh James Holston (2009) di Brasil atau Saskia Sassen (2010) tentang *global cities*. Namun, penelitian ini menawarkan pembaruan dalam dua hal: pertama, dengan membawa konteks kota di luar Jawa sebagai objek kajian utama; dan kedua, dengan menggabungkan narasi lapangan, simbol visual, dan analisis kultural dalam satu pendekatan sintetik. Kekuatan utama dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk membaca kota sebagai teks yang hidup di mana warga bukan hanya penerima ruang, tapi juga pembentuk makna. Temuan ini membuka ruang untuk pendekatan kebijakan yang lebih inklusif: kota tidak cukup hanya indah secara visual, tapi juga harus adil secara simbolik.

Hubungan antara ruang dan identitas tampak dalam cara masyarakat menafsirkan simbol-simbol kota. Nama jalan, monumen, dan arsitektur kolonial di Makassar menjadi penanda sejarah dan ingatan kolektif yang terus dinegosiasikan. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai simbol warisan budaya, sementara sebagian lain memaknainya sebagai representasi kekuasaan masa lalu yang perlu dikritisi. Proses penafsiran ini memperlihatkan bahwa identitas perkotaan tidak pernah statis, melainkan hasil dari interaksi dinamis antara kekuasaan, budaya, dan masyarakat. Oleh sebab itu, memahami kota berarti membaca lapisan makna simbolik yang terus berubah sesuai konteks sosial dan politik yang melingkupinya.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa tata ruang kota bukanlah sekadar hasil dari kalkulasi teknis atau perencanaan fungsional semata, melainkan merupakan ruang simbolik yang sarat dengan makna dan kepentingan. Melalui studi kasus Kota Makassar, terlihat dengan jelas bahwa ruang kota dikonstruksi untuk merepresentasikan kekuasaan-baik oleh negara maupun kapital melalui bentuk-bentuk visual seperti monumen, gedung pemerintahan, jalan protokol, hingga zona komersial elite. Simbol-simbol tersebut tidak hanya menata ruang secara fisik, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif warga tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang diatur.

Pencapaian utama dari penelitian ini terletak pada kemampuannya mengurai bagaimana simbol dan representasi bekerja secara sistematis dalam ruang kota. Dengan menggabungkan teori representasi budaya Stuart Hall, produksi ruang Henri Lefebvre, dan hegemoni budaya Antonio Gramsci, penelitian ini membuktikan bahwa kota adalah medan produksi makna, tempat kekuasaan dipertontonkan dan dipertahankan secara halus namun kuat. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa warga tidak hanya menjadi objek pasif dari representasi dominan, melainkan juga mampu menciptakan narasi alternatif dan ruang resistensi yang hidup melalui seni, komunitas, dan praktik simbolik sehari-hari.

Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini yakni untuk mengungkap bagaimana simbol dan tata ruang kota digunakan sebagai sarana dominasi maupun perlawanan dalam konteks urban dapat dikatakan tercapai secara utuh. Kota Makassar, sebagaimana kota-kota besar lainnya, memperlihatkan bahwa pertarungan atas makna ruang terus berlangsung, tidak hanya dalam ranah kebijakan atau desain, tetapi juga dalam pengalaman dan ekspresi warga yang terlibat di dalamnya.

Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam wacana akademik urban studies, khususnya dalam upaya membaca kota sebagai konstruksi budaya dan ideologis. Ia sekaligus menjadi pengingat bahwa membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang siapa yang diizinkan untuk merasa memiliki, hadir, dan bermakna di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akil, A., Yudono, A., Latief, I., & Radja, A. M. (2014). Application of Buginese-Makassarese culture in Makassar City, Indonesia. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 2(4), 68–80. https://doi.org/10.14246/irspsd.2.4_68
- Alcaraz, T. G. (2024). Decoding urban power: architecture, symbolism and territorial control in Caracas. *City, Culture and Society*, 39, 100608.
- Allen, John. (2010). Powerful City Networks: More than Connections, Less than Domination and Control. *Urban Studies*, 47(13), 2895–2911. <https://doi.org/10.1177/0042098010377364>
- Andersson, E., Borgström, S., Haase, D., Langemeyer, J., Mascarenhas, A., McPhearson, T., Wolff, M., Laszkiewicz, E., Kronenberg, J., Barton, D., & Herreros, P. (2021). A context sensitive systems approach for understanding and enabling ecosystem service realisation in cities. *ECOLOGY AND SOCIETY*, accepted. <https://doi.org/10.5751/ES->

12411-260235

- Arifin, T., Nur Amri, S., Rahmania, R., Yulius, Ramdhan, M., Chandra, H., Adrianto, L., Geoffrey Bengen, D., Kurniawan, F., & Kurnia, R. (2023). Forecasting land-use changes due to coastal city development on the peri-urban area in Makassar City, Indonesia. *The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science*, 26(1), 197–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2023.02.002>
- Awad, S. H. (2017). Documenting a contested memory: Symbols in the changing city space of cairo. In *Culture & Psychology* (Vol. 23, Issue 2, pp. 234–254). Sage Publications. <https://doi.org/10.1177/1354067X17695760>
- Collister, S., & Bowman, R. S. (2018). No Title. In *Visual Public Relations*. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315160290>
- Colombijn, F. (2006). Planning and social tension in Indonesian cities. *Global Bioethics: Problemi Di Bioetica. ANNUAL ISSUE-Volume 19, 2006*, 1000–1012.
- Daly, P., Dias, A. L., & Patuleia, M. (2021). The impacts of tourism on cultural identity on Lisbon historic Neighbourhoods. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 8(1), 1–25.
- Fansuri, H. (2017). Konsumerisme dan Hegemoni Barat terhadap Masyarakat Negara Berkembang. *Journal of Integrative International Relations*, 3(2), 33–51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4891745>
- Fawzy, R. M. (2023). Commodification of the Egyptian new capital: A Semio-Foucauldian landscape analysis. *Space and Culture*, 26(4), 488–504.
- Filion, P., & Keil, R. (2017). Contested infrastructures: Tension, inequity and innovation in the global suburb. *Urban Policy and Research*, 35(1), 7–19.
- Firzal, Y. (2020). Redefining urban architecture in the decentralization era. *AIP Conference Proceedings*, 2230(1), 40004.
- González, Ó. (2023). Características de los pasajes comerciales y las grandes galerías modernas de Las Palmas de Gran Canaria: una revisión teórica sobre el espacio colectivo. *ACE: Architecture, City and Environment*, 18. <https://doi.org/10.5821/ace.18.52.11926>
- Jokar, S., Hajilou, M., Meshkini, A., & Esmaeili, A. (2022). Assessment of urban identity in newly built neighborhoods; Case of Pardis neighborhood in Ahvaz city, Iran. *GeoJournal*, 87(6), 4531–4546.
- Kebir, B., & Zeghiche, A. (2022). Le renouvellement urbain à Annaba, entre recherche d'équité territoriale et tendance à la gentrification. *Cybergeog: European Journal of Geography*.
- Khokholova, I., Danilova, N., Kysylbaikova, M., Pestereva, K., Vasileva, A., Maximova, D., & Dyachkovskiy, S. (2021). Symbolic capital as a brand tool of sociocultural life (on the material of the northern cities of the Republic of Sakha (Yakutia)). *Journal of Education Culture and Society*, 12(2), 597–612.

- Kim, H. J., & Min, B. (2019). Power and public space: A historical observation of Seoul Plaza. *Sustainability*, 11(5), 1379.
- Knox, P. L., & McCarthy, L. M. (2012). *Urbanization: an introduction to urban geography*. Pearson Boston.
- Kozlova, M. A. (2021). Intermediality and the City Text: Towards an Analysis of a "City Picture." *Izvestiya RAN. Seriya Literaturny i Yazyka*, 80(4), 43–53. <https://doi.org/10.31857/S241377150013617-1>
- Lagopoulos, A. P. (2019). The semiotics of urban space. In *The Routledge companion to urban media and communication* (pp. 23–35). Routledge.
- Lee, J. (2022). A multi-scale perspective on production of space: A critical review of urban design. *Cities*, 121, 103497. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103497>
- Levin-Keitel, M., & Reeker, I. K. (2021). Approaches to integrate land-use and transport planning: Analysing the political dimension of integrative planning. *Raumforschung Und Raumordnung/Spatial Research and Planning*, 79(3), 214–227.
- Matamanda, A. R., Chirisa, I., Kanonhuhwa, T. N., & Mhlanga, D. D. (2021). Politics and the legacy of street renaming in postcolonial Zimbabwe. *Journal of Cultural Geography*, 38(3), 336–353.
- Monnet, J. (2011). The symbolism of place: A geography of relationships between space, power and identity. *Cybergeo: European Journal of Geography*.
- Mourtada, R. (2019). The Symbolic Dimension of the Urban and Cultural Landscape in Baalbek (Lebanon): The Challenge of Resistance and/or Instruments of Power. *Dearq*, 24, 48–59.
- Palutturi, S., Saleh, L. M., Rachmat, M., Shabir, A. M., Rosmanely, S., Aidillah, M. R., Malek, J. A., & Nam, E. W. (2021). Inter-community Relations Factor on the Empowerment of the Aisle Community in Makassar City: A Structural Equation Model. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(E), 1358–1362.
- Patel, K., & Manvi, N. (2023). Influence and Depiction of Power in an Urban Space. *International Conference on Research into Design*, 3–17.
- Rahim, M., & Abbas, I. (2024). The Development Characteristics of Makassar City in Past and Present. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 12(2), 238–265.
- Rutanen, N. (2017). Spatial perspective on everyday transitions within a toddler group care setting. In *Studying babies and toddlers: Relationships in cultural contexts* (pp. 49–62). Springer.
- Šakaja, L., & Crljenko, I. (2017). Peripheral City-Text. Street Names and Monuments in Dubrava (Zagreb)–a Semiotic Perspective. *Etnološka Tribina: Godišnjak Hrvatskog Etnološkog Društva*, 47(40), 236–259.

- Sheng, L., & Gao, J. (2018). Foreign investors versus host communities: An Urban political economy model for tourist cities. *Argumenta Oeconomica*, 41(2), 257–276. <https://doi.org/10.15611/aoe.2018.2.11>
- Surya, B., Salim, A., Hernita, H., Suriani, S., & Abubakar, H. (2023). Environmental Quality Deterioration in the Mamminasata Metropolitan New City Area, South Sulawesi, Indonesia. *International Journal on Advanced Science, Engineering & Information Technology*, 13(4).
- Surya, B., Salim, A., Hernita, H., Suriani, S., Abubakar, H., & Saleh, H. (2021). Handling Slum Settlement Based on Community Participation and Socio-Cultural Change: Perspective of Sustainable Development of Makassar City, Indonesia. *Geographica Pannonica*, 25(4).
- Taylor, K. (2016). The Historic Urban Landscape paradigm and cities as cultural landscapes. Challenging orthodoxy in urban conservation. *Landscape Research*, 41(4), 471–480.
- Uddin, K. F., & Piracha, A. (2023). Urban planning as a game of power: The case of New South Wales (NSW), Australia. *Habitat International*, 133, 102751.
- Xie, Y., Yang, R., Liang, Y., Li, W., & Chen, F. (2022). The spatial relationship and evolution of world cultural heritage sites and neighbouring towns. *Remote Sensing*, 14(19), 4724.